

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Misra Sarumaha<sup>1</sup>, Annisa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP

Alamat: Jl. Khatib Sulaiman No.61, Lolong Belanti, Kota Padang

Email: [misrasarumaha560@gmail.com](mailto:misrasarumaha560@gmail.com)<sup>1</sup>, [annisa@akbpstie.ac.id](mailto:annisa@akbpstie.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract.** *This study aims to re-examine previous research between independent variables, namely local revenue and capital expenditure on financial independence. The object in this study is Financial Independence and the subject of this research is the Regional Government of West Sumatra Province for 2019-2021. The population in this study is the report on the realization of the budget revenues, capital expenditures and regional revenues of the Regional Government of West Sumatra Province. The type of data in this study uses a quantitative approach. The data source used is secondary data, namely data collected from existing records. This study took research samples using sensu techniques or saturated samples. The sample used in this study is the report on the realization of the APBD (Regional Revenue and Expenditure Budget) of the Regency/City Regional Government of West Sumatra Province which has been audited by the BPK with a total of 19 samples. The results of this study indicate that Regional Original Income has a positive effect on regional financial independence. Meanwhile, capital expenditure has a negative effect on regional financial independence.*

**Keywords:** *Regional Original Income, Capital Expenditures, Regional Financial Independence*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian kembali penelitian terdahulu antar variabel independen yaitu pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan. Objek dalam penelitian ini adalah Kemandirian Keuangan dan subjek pada penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2021. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan, belanja modal dan pendapatan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Jenis data dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari catatan yang sudah ada. Penelitian ini mengambil Sampel penelitian menggunakan teknik sensu atau sampel jenuh. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini laporan realisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat yang telah diaudit BPK dengan jumlah 19 sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan Belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Kemandirian Keuangan Daerah

## LATAR BELAKANG

Realisasi pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu bentuk penerapan otonomi daerah yang dituju untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pernyataan ini sesuai dengan instruksi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur perlunya otonomi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan daerah untuk mengelola keuangan daerah tanpa harus bergantung dengan pendanaan pihak eksternal. Keuangan Daerah Mandiri menunjukkan kemampuan pemerintah untuk membiayai pemerintahannya sendiri dan membangun daerah dengan menggunakan pendapatan asli daerah (PAD). Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dan diukur dari pengaruh penerimaan daerah awal yang dihimpun oleh masing-masing pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten maupun kota, relatif terhadap anggaran yang berasal dari luar daerah, seperti dana talangan pemerintah pusat atau dana perimbangan dan pinjaman dana. Daerah yang mandiri adalah apabila pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan yang utama dalam membiayai pengeluaran daerah sehingga tidak bergantung pada pinjaman kepada *stakeholder*, pemerintah provinsi maupun pusat. Kemandirian daerah ditujukan untuk menggambarkan rasio ketergantungan pada sumber pendanaan pihak eksternal.

Pelaksanaan otonomi daerah yang menitik beratkan pada kabupaten/kota, diawali dengan penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan, hal ini merupakan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait pendelegasian berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi membutuhkan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sendiri adalah kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat diukur melalui perbandingan total pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Pemerintah daerah dapat dikatakan hampir mampu dalam melaksanakan otonomi daerah secara mandiri apabila tingkat kemandirian yang dihasilkan  $> 50\%$ , namun faktanya, di Indonesia masih sangat sedikit pemerintah daerah yang termasuk kedalam kategori mandiri secara keuangan.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak, retribusi, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya. Yang merupakan ciri utama daerah yang dapat melaksanakan otonomi adalah kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan (kekuasaan) untuk dapat menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah serta mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai aktivitas pemerintahan, daerah yang memiliki ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah (PAD) menjadi sumber (Malau & Parapat, 2020).

Kemandirian daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, semakin mandiri suatu daerah maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Sebagai salah satu provinsi di Indonesia, setiap kabupaten/kota di Sumatera Barat menginginkan kemandirian keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 yaitu adalah pendapatan yang dipungut atau diperoleh daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat unsur pendapatan dan belanja. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah asset tetap. Pada dasarnya alokasi belanja modal digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan ataupun untuk fasilitas.

Menurut penelitian Oktavia & Handayani, (2021) PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, semakin besar PAD yang diterima suatu daerah maka akan semakin mandiri daerah tersebut dalam mengelola keuangan daerahnya. Sedangkan belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan daerah dalam mengelola keuangan dan penerimaan belanja modal kurang optimal. Hasil penelitian ini

konsisten dengan penelitian (Malau & Parapat, 2020; Machfud *et al.*, 2021) bahwa dimana rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan. Penelitian yang dilakukan PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, artinya bahwa setiap kenaikan PAD akan diikuti dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kemandirian keuangan daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian. Peneliti mengambil objek penelitian seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat terletak di bagian barat Pulau Sumatera dan langsung berbatasan dengan Samudera Hindia. Provinsi Sumatera Barat memiliki banyak destinasi wisata alam, mulai dari gunung, pantai, pulau danau dan perkebunan. Hal ini yang menjadikan Provinsi Sumatera Barat potensial dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi destinasi objek yang dipungut atau diperoleh daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan asli daerah itu sendiri dan perlu ditingkatkan untuk mengurangi beban biaya kegiatan yang bertujuan untuk kemandirian daerah dan untuk meningkatkan pemerintahan guna mencapai kemandirian daerah. Hal ini rendahnya pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya, perluasan sumber pendapatan lain-lain yang sah, yaitu hasil penjualan aset lainnya dan pendapatan jasa layanan umum nilai masih sangat rendah. Menurut penelitian (Wahyuni, Eny & Ardini, 2018) rasio efektivitas pendapatan asli daerah.

**PAD** = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang  
Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah

### **Belanja Modal**

Belanja modal adalah belanja daerah untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang dapat dimanfaatkan selama beberapa periode akuntansi. Moda Belanja merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menunjang pelayanan daerah. Perluasan infrastruktur dan pelayanan kepentingan umum sebagai bentuk investasi seharusnya dapat meningkatkan kemandirian daerah di masa mendatang. Dalam

hal ini, belanja modal diharapkan meningkat dengan produktivitas lokal, memungkinkan kemandirian finansial. Menurut (Wahyuni, Eny & Ardini, 2018) belanja modal dapat diukur dengan menggunakan rasio belanja modal yaitu

**Belanja Modal** = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigrasi dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya.

### **Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan dari daerah untuk menggali potensi sumber daya sehingga dapat mengurangi atau tidak tergantung pada pihak luar daerah. Keuangan daerah yang mandiri menunjukkan kemampuan pemerintah untuk membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan menggunakan sumber pendapatan asli daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah ini merupakan kemampuan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk membiayai sendiri kegiatannya dengan menggali sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Menurut (Wahyuni, Eny & Ardini, 2018) tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah yaitu :

$$\text{Rasio Kemandirian} = (\text{Total PAD} / \text{Total Pendapatan Daerah}) \times 100\%$$

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil olah data statistik dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hipotesis pertama pada penelitian ini dapat diterima dengan kata lain memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Yang artinya bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan upaya peningkatan dalam membangun daerah agar dapat digunakan oleh masyarakat setempat, sehingga nantinya akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah yang maksimal.

Hasil dari penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Malau & Parapat, (2020) dan Fauziah, (2019) hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa setiap kenaikan PAD akan diikuti dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini sesuai dengan teori *signaling* dimana pemerintah daerah memberi daerah sinyal informasi kenaikan pendapatan asli daerah sebagai capaian kemandirian keuangan daerah. Pemerintah daerah mampu menggali potensi sumber daya daerah sehingga tidak terlalu tergantung pada pemerintah provinsi/pusat.

**H1** : Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

### **Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Hasil penelitian (Malau & Parapat, 2020) membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, artinya kenaikan belanja modal menyebabkan penurunan kemandirian keuangan daerah dan pemerintah daerah memberikan informasi bahwa kenaikan belanja modal digunakan untuk pembangunan fasilitas publik.

. Penelitian Oktavia & Handayani, (2021) Belanja Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan daerah dalam mengelola keuangan dan penerimaan belanja modal kurang optimal Berdasarkan bukti penelitian terdahulu, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

**H2** : Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang didasarkan pada filosofi prinsip empiris, digunakan untuk penelitian kelompok atau sampel tertentu, Jadi tujuannya adalah untuk menguji hipotesis yang diberikan (Sugiyono, 2019).

Data sekunder yang peneliti gunakan berupa laporan realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah terbitkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia unit Sumatera yang diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2019 sampai dengan 2021.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dan sampel yang digunakan yaitu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota dari tahun 2019-2021.

### **Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan, mencatat dan menghitung data yang diambil di Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK).

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berguna untuk mengetahui hubungan antara suatu variabel dependen dengan variabel independen. Model regresi di dalam model *pool* data atau panel dilakukan berdasarkan penggunaan dua model waktu yaitu *time series* dan *cross section*.

Pada penelitian ini model regresi panel yang digunakan dalam bentuk berganda yang dapat dirumuskan ke dalam penelitian ini adalah:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \varepsilon_{it}$$

#### **Keterangan:**

$Y_{it}$  = Kemandirian Keuangan Daerah

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$ - $\beta_2$  = Koefisien regresi variabel independen

$X1_{it}$  = Pendapatan Asli Daerah

$X2_{it}$  = Belanja Modal

$\varepsilon_{it}$  = Variabel pengganggu (*Residual Error*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Langkah Pemilihan Model**

Terdapat tiga estimasi model dalam data panel yakni *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM) dan *random effect model* (REM) dengan patokan hasil uji *chow* dan uji *hausman*.

#### *1) Chow test*

Uji *chow* digunakan untuk mengetahui pilihan model yang lebih baik digunakan, yakni antara *common effect* dan *fixed effect*. Jika pada *Cross-section Chi-square* lebih kecil dari alpha ( ) ( $0,0000 < 0,05$ ), maka  $H_a$  ditolak artinya model *Fixed effect* lebih baik digunakan dari pada model *Common effect*.

**Tabel 1. Output Chow Test**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section Chi-square	203,919,657	18	0,0000

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan E-Views8 2023

Hasil dari uji chow pada tabel 1 dengan menggunakan E-Views 8 menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0000. Nilai probabilitas lebih kecil dari level signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ) maka  $H_a$  untuk model ini diterima dan  $H_0$  ditolak. Oleh karena itu model yang dipilih adalah fixed effect.

2) *Hausman Test*

Uji *hausman* digunakan untuk mengetahui pilihan model yang lebih baik digunakan, yakni antara *fixed effect model* atau *random effect model*.

Jika probabilitas  $< 0,05$  maka digunakan *fixed effect model*

Jika probabilitas  $> 0,05$  maka digunakan *random effect model*

**Tabel 2. Output Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13,506828	2	0,0012

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan E-views8 2023

Hasil dari uji chow pada tabel 2 dengan menggunakan E-views 8 menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0012. Nilai probabilitas lebih kecil dari level signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ). Oleh karena itu model yang dipilih *fixed effect*.

Berdasarkan hasil kedua estimasi model regresi, yakni antara Chow Test (Tabel 4.2) dan Hausman Test (tabel 4.3), maka yang digunakan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) untuk dapat mengestimasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil estimasi menggunakan FEM dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3. Output Regresi Data Panel**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.035650	0.008843	4.031516	0.0003
PAD	6.745406	7.858574	8.583498	0.0000
BELANJA_MO	-7.624202	1.365857	-5.581989	0.0000

Sumber: Data Sekunder yang sudah diolah dengan E-views8 2023

$$Y = 0,036550 + 6,7454062X_1 - 7,624202X_2$$

Penjelasan dari persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan persamaan linear berganda pada tabel diatas diketahui bahwa nilai konstanta sebesar 0,036550 atau 0,04 persen, maka dapat disimpulkan bahwa nilai konstantan bernilai positif. Variabel Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal dianggap konstanta.
- 2) Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) diketahui bahwa nilai koefisien sebesar 6,7454062, maka dapat disimpulkan setiap kenaikan tingkat ketergantungan keuangan daerah sebesar 1% maka akan menaikkan kemandirian keuangan daerah sebesar 6,74 persen.
- 3) Koefisien regresi variabel Belanja Modal ( $X_2$ ) diketahui bahwa nilai koefisien sebesar -7,624202 atau bernilai negative hal ini memiliki makna bahwa setiap keanaikan tingkat Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat sebesar 1% akan menurunkan kemandirian keuangan daerah sebesar 7,62 persen.

### Uji Model Regresi Data Panel

#### Uji t Test

Uji t ini dilakukan untuk membandingkan nilai  $\alpha$  (alpha) dengan nilai p-value, pada uji t juga dapat diketahui arah masing-masing variabel independen dengan melihat tanda koefisien regresinya. Berikut hasil perhitungan regresi linear berganda, dapat dilihat pada Tabel 4.7, menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4. Output Regresi Linier Berganda**

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob.
PAD	6.745.406	8.583.498	0.0000
BELANJA_MO	-7.624.202	-5.581.989	0.0000

- 1) Hipotesis pertama menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
- 2) Hipotesis kedua pengujian signifikansi secara persial antara variabel Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

### Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model regresi dalam memprediksi variabel dependen, koefien determinasi memiliki besaran nilai anantara nol sampai dengan satu. Jika hasil pengujian memperoleh nilai  $R^2$  yang mendekati angka satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependennya.

**Tabel 5. Output Uji Koefisien Determinasi**

N	R-squared	Adj. R-squared
57	0.992453	0.988260

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan E-Views8 2023

Berdasarkan pada tabel 5 hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) diatas menunjukkan nilai *Adjusted R Squared* ( $R^2$ ) sebesar 0,988260. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 98,82%. Sedangkan sisanya sebesar 1,18% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

### Pembahasan Hasil Penelitian

#### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil olah data statistik dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hipotesis pertama pada penelitian ini dapat diterima dengan kata lain memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Yang artinya bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan upaya peningkatan dalam membangun daerah agar dapat digunakan oleh masyarakat setempat, sehingga nantinya akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah yang maksimal.

Hasil dari penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Malau & Parapat, (2020) dan Fauziah, (2019) hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa setiap kenaikan PAD akan diikuti dengan peningkatan kemandirian keuangan

daerah. Berdasarkan data statistik yang ada pada penelitian ini, Rata-rata atau nilai mean tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2021 yakni sebesar 0,096 atau 9,6%. Sementara diketahui bahwa tingkat yang memiliki Kemandirian Keuangan Daerah terendah yakni pada Kab. Kepulauan Mentawai tahun 2021 diketahui nilai minimum sebesar 0,038111. Sedangkan yang memiliki tingkat Kemandirian Keuangan Daerah tertinggi yakni Kota Padang tahun 2021 diketahui nilai maximum sebesar 0,242515 Hal ini menunjukkan pencapaian pemerintah daerah sangat jauh dari apa yang diharapkan. Pemerintah daerah dapat dikatakan mampu mandiri secara finansial apabila kontribusi PAD > 50% terhadap jumlah pendapatan yang mereka terima. Oleh sebab itu pemerintah dituntut untuk meningkatkan lagi pendapatan asli sehingga memberikan dampak pada kemandirian daerah.

Pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan daerah yang mencerminkan kondisi riil daerah dan menunjukkan kemandirian keuangan daerah. PAD sendiri dapat diartikan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

#### **Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan daerah**

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua pada penelitian ini menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Berdasarkan uji statistic dengan menggunakan regresi data panel didapatkan hasil bahwa hipotesis kedua pada penelitian ini diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Belanja Modal memiliki kontribusi yang negatif dan signifikan dalam pergerakan tingkat kemandirian keuangan daerah. Artinya semakin besar belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maka akan menurun tingkat kemandirian keuangan daerah yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Hasil pada penelitian ini sejalan dengan Penelitian Malau & Parapat, (2020) dan Oktavia & Handayani, (2021) yang membuktikan bahwa variabel belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, artinya kenaikan belanja modal menyebabkan penurunan kemandirian keuangan daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan penganggaran belanja modal tidak selamanya diimbangi dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Akibatnya belanja modal yang telah dianggarkan sangat bergantung pada dana bantuan dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah dinilai belum bisa mandiri secara finansial.

Berdasarkan hasil deskriptif statistik pada penelitian ini, belanja modal yang terjadi masih rendah sehingga banyak ketimpangan tingkat kemandirian keuangan antar daerah. Keberadaan anggaran belanja modal yang bersumber dari bantuan pusat/provinsi dan pendapatan asli daerah, yang apabila dibandingkan dengan investasi swasta mempunyai nilai yang relatif kecil, namun belanja modal tersebut mempunyai peranan strategis, karena sasaran penggunaannya untuk membiayai pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran usaha swasta dan pemenuhan pelayanan masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah dan variabel Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

Hipotesis pertama diterima, yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap variabel kemandirian keuangan daerah. Hal ini menjelaskan bahwa semakin besar PAD yang diterima suatu daerah maka akan semakin mandiri daerah tersebut dalam mengelola keuangan daerahnya. Hipotesis kedua diterima, yaitu variabel Belanja Modal terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemandirian keuangan daerah. Artinya bahwa setiap peningkatan belanja daerah akan menyebabkan penurunan kemandirian keuangan daerah.

### **Saran**

Berdasarkan penelitian diatas serta kesimpulan dan keterbatasan yang telah peneliti jabarkan sebelumnya, maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah agar menggali potensi daerahnya seperti intensifikasi penerimaan pajak daerah dan meminimalisir penggunaan dana perimbangan sehingga terciptanya daerah otonom yang mandiri.
2. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat menambah variable lain yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah serta memperpanjang perbedaan waktu (lag).

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

- Mansuri. (2016). Modul Praktikum Eviews. *Modul Praktikum Eviews*, 54.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Winarno, W. W. (2015). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews* (4th ed.). UPP STIM YKPN.
- Winarno, W. W. (2017). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews* (5th ed.). Yogyakarta: STIM YKPN.

### **Jurnal**

- Bella, S., Sari, F., & Aswin, U. R. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *3*(5).
- Billy, F. (2019). Retribusi Daerah: Pengertian, Jenis Tarif, dan Bedanya dari Pajak Daerah. In *Online Pajak*. <https://www.online-pajak.com/retribusi-daerah>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2019). Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Di Indonesia. *1*(1), 1–11. Arisetberbagi.com
- Fauziah, A. A. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, *8*(2), 1–13.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program *IMB SPSS 21*. Alfabeta.
- Handayani, T. U., & Erinos. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel *Moderating*. *2*(1), 2348–2361.
- Haryanto & Amalia. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, *8*(2), 1–13.
- Machfud, M., Asnawi, A., & Naz'aina, N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, *5*(1), 14. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3423>
- Malau, & Parapat. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, *3*(2), 332–337. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v3i2.196>
- Oktavia, C., & Handayani, N. (2021). Pengaruh PAD, Tax Effort, Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *10*(3), 1–20.

Wahyuni, Eny & Ardini, L. (2018). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(6), 1–16.